

BUKU

- Aan Eko Widiyanto dan Rachmad Syafa'at, **Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik**, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD), Malang, 2006
- Dadang Solihin dan Deddy Supriady, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011
- Hanif Norcholis, **Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, PT Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta, 2005
- HAW. Widjaja. 2003. **Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Muhammad Fauzan, **Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah**, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Pustaka Media Group, Jakarta, 2010,
- Philip M Hadjon dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011
- R. Bintarto, **Suatu Pengantar Geografi Desa**, U.P.Spring, Yogyakarta, 1977
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-43, 2010
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, **Desa**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Suharsimi Arikunto, **Prosedure Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rienike Cipta, Jakarta, 2002
- Sumber Saporin, **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**, Ghalia Indonesia, Bogor, 1977

Taliziduhu Ndraha, **Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1981

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;

Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Pasar Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang- Undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
Pasar Desa.

INTERNET

Ebta Setiawan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi
online/daring (dalam jaringan)**, <http://kbbi.web.id/wenang> (*online*),

Sekretariat Jendral MPR RI, **D. Hasil Perubahan & Naskah Asli UUD 1945**,
<https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab->

ii-uud-nri-tahun-1945/d-hasil-perubahan--naskah-asli-uud-1945-2 di
akses pada 24 Desember 2014.

Siti Nuraini, 2010, **Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa** (online),
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19451&val=1230>
diakses pada 26 Desember 2014

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;

Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Pasar Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang- Undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
Pasar Desa.